

---

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Tahun Anggaran 2022**

---

## **DINAS SOSIAL** PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

---

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### **DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12

Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 3224185

PALANGKA RAYA 73112

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas PerkenanNya telah Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan target dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 terutama dalam rangka mengatasi dan menjangkau permasalahan sosial dan kemiskinan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini disusun sebagai dasar acuan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan bidang Sosial pada Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, Agustus 2021

PIC Kepala Dinas,



**FARID WAJDI, A.KS., M.SW**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700724 199201 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	5
1.4	Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	8
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan PD .....	16
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	19
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat....	49
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1	Telaah Kebijakan Nasional .....	52
3.2	Tujuan dan Sasaran .....	54
3.3	Program dan Kegiatan .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>88</b>

LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, sehingga penyusunan Renja Awal PD dilakukan secara simultan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 disusun untuk memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses dari penyusunan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran PD terkait dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022 dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak **Corona Virus Disease 19** baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2021 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dilanjutkan Tahun 2022 guna mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih baik lagi.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 34.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Perubahan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indoensia Nomor 1622).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penerimaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
15. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
19. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611).
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
33. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
34. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34).
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
39. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 yang menjadi acuan kerja Dinas sosial dalam penyusunan program kerja dan anggaran Tahun 2022 serta untuk merumuskan prioritas kegiatan prioritas daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Sebagai acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
- b. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
- c. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, memuat evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

**BAB V PENUTUP** memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran APBD untuk belanja langsung sebesar Rp. 15.695.352.660 (lima belas milyar enam ratus Sembilan puluh lima juta tiger ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp . 13.970.460.155 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu serratus lima puluh lima rupiah), sehingga jumlah pagu anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 29.665.812.815 (Dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Penyerapan anggaran yang dicapai pada akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2020 untuk belanja langsung sebesar Rp. 14.775.345.694 dengan Prosentase 94,14% sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.483.800.518 dengan prosentase 89,36%, sehingga secara keseluruhan penyerapan anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 27.259.146.212 dengan prosentase penyerapan keuangan 91.89% dan Realisasi Fisik sebesar 100%. Secara terperinci, penggunaan dana untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah pada sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2020 , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1  
Realisasi anggaran APBD Dinas Sosial Tahun 2020**

NO	KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.690.562.363</b>	<b>3.381.803.878</b>	<b>72,10</b>	<b>100,00</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	16.000.000	15.949.500	99,69	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	621.112.063	442.492.328	71,24	100,00
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	13.000.000	10.524.331	80,96	100,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.472.835.200	2.222.673.020	89,88	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.000.000	194.310.810	99,65	100,00

6	Penyediaan alat tulis kantor	117.921.600	117.908.725	99,99	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	139.700.000	138.957.000	99,47	100,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	113.983.500	113.928.600	99,95	100,00
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000	20.647.000	82,59	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	189.500.000	181.080.000	95,56	100,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	16.962.500	42,41	100,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	102.510.000	101.318.587	98,84	100,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	644.000.000	550.710.000	85,51	100,00
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.873.347.000</b>	<b>1.704.270.716</b>	<b>90,97</b>	<b>100,00</b>
14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	550.000.000	482.895.000	87,80	100,00
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	207.850.000	200.480.000	96,45	100,00
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.000.00	13.816.000	86,35	100,00
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	407.497.000	383.164.900	94,03	100,00
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	547.000.000	479.555.816	87,67	100,00
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	110.000.000	109.960.000	99,96	100,00
20	Pembuatan dan pengembangan website Dinas Sosial	35.000.000	34.339.000	98,28	100,00
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.256.930.385</b>	<b>1.115.303.985</b>	<b>95,14</b>	<b>100,000</b>
21	Pendidikan dan pelatihan formal	38.100.000	17.275.000	45,34	100,00
22	Rapat koordinasi perencanaan	35.380.385	35.380.385	100,00	100,00
23	Sosialisasi/penyuluhan sosial PMKS	894.230.000	864.975.300	96,73	100,00
24	Pengembangan sumber daya aparatur kesejahteraan sosial	66.000.000	65.860.000	99,79	100,00
25	Monitoring dan evaluasi pemuktahiran basis data terpadu PMKS	223.220.000	222.783.850	99,80	100,00
IV	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.999.950</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00
27	Penyusunan RKPD/ renja dan laporan kinerja SKPD	35.000.000	34.999.950	100,00	30,00
V	<b>Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</b>	<b>56.000.000</b>	<b>56.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
28	Ekspose Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	56.000.000	56.000.000	100,00	100,00
VI	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>611.261.5000</b>	<b>603.456.980</b>	<b>98,72</b>	<b>100</b>

29	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	508.261.500	502.917.358	98,95	100,00
30	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	103.000.000	100.539.822	97,61	100,00
<b>VII</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.190.325.114</b>	<b>1.176.828.900</b>	<b>97,87</b>	<b>100,00</b>
31	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	25.197.500	25.197.500	100,00	100,00
32	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga	195.695.000	187.282.800	95,70	100,00
33	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pabelum	327.150.000	326.252.300	99,73	100,00
34	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi di PSBR	306.394.764	303.314.000	98,99	100,00
35	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSKW	335.887.850	334.782.300	99,67	100,00
<b>VIII</b>	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	<b>555.840.000</b>	<b>552.970.000</b>	<b>99,48</b>	<b>100,00</b>
36	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	555.840.000	552.970.000	99,48	100,00
<b>IX</b>	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	<b>195.659.400</b>	<b>173.562.700</b>	<b>88,71</b>	<b>100,00</b>
37	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	95.659.400	95.274.400	99,60	100,00
38	Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	100.000.00	78.288.300	78,29	100,00
<b>X</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	<b>939.531.000</b>	<b>923.892.430</b>	<b>98,34</b>	<b>100,00</b>
39	Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo	939.531.000	923.892.430	98,34	100,00
<b>XI</b>	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>117.089.300</b>	<b>116.889.300</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>
40	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	18.089.900	18.089.000	100,00	100,00
41	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	98.999.400	98.799.400	99,80	100,00
<b>XII</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>858.207.598</b>	<b>851.150.973</b>	<b>98,94</b>	<b>100,00</b>
42	Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	136.000.000	135.000.000	99,26	100,00
43	Pemberdayaan organisasi sosial	62.650.000	62.520.000	99,79	100,00
44	Pemberdayaan Karang Taruna	100.538.298	99.438.298	98,91	100,00
45	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	135.059.100	132.248.475	97,92	100,00
46	Penanganan Komisi Daerah Lanjut Usia	51.894.000	51.894.000	98,58	100,00
47	Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT	372.066.200	370.786.200	99,66	100,00
<b>XIII</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>3.280.599.000</b>	<b>3.412.389.772</b>	<b>92,38</b>	<b>100,00</b>
48	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2.380.750.000	2.334.623.300	98,06	100,00

49	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	734.800.000	714.929.740	97,30	100,00
50	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	165.049.000	163.033.300	98,78	100,00
<b>J U M L A H</b>		<b>15.695.352.660</b>	<b>14.775.345.694</b>	<b>94,14</b>	<b>100,00</b>

Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya adalah :

- ❑ Tujuan 1 : Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program		Indikator Kinerja		Kelompok Sasaran
1		2		3
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat bantuan sosial	130 KK
		2.	Jumlah Petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan FM yang mendapat bimbingan pelatihan	275 orang
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	15 orang
		2.	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80 orang
		3.	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi di Panti Sosial Tresna Werdha	80 orang Lanjut Usia terlantar
		4.	Jumlah lanjut usia terlantar dalam keluarga yang mendapatkan pelayanan sosial	39 orang
		5.	Jumlah Anak Terlantar dan WRSE yang mendapatkan pelayanan di Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita	70 orang anak terlantar dan WRSE
		6.	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan di Trauma Center	25 Orang

- ❑ Tujuan 2 : Terwujudnya kemitraan dan aktualisasi potensi Kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial

Program		Indikator Kinerja		Target
1.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.	Jumlah Karang taruna yang diberdayakan dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	30 Orang
		2.	Jumlah LSM dan Organisasi yang diberdayakan dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	5 Orsos
		3.	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang diberdayakan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial	35 orang

		4.	Jumlah kegiatan pendayagunaan KOMDA Lansia	1 Laporan
		5.	Jumlah generasi muda yang mengikuti kegiatan pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	1 Laporan

□ Tujuan 3 : Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipasi Bencana Alam dan Sosial

Program		Indikator Kinerja		Target
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.	Jumlah PMKS Korban Bencana Alam yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Orang
		2.	Jumlah Lokasi yang mendapatkan pendampingan kegiatan PKH	14 kab/kota
		3.	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kepada PMKS korban bencana sosial	1 Laporan

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2021 khususnya yang bersumber dana APBD sampai dengan Desember 2021 dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian fisik sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program kegiatan Tahun 2018			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2019	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019	
				Target Renja SKPD 2018	Realisasi Renja PD 2018	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian prog dan keg s/d tahun 2019	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA</b>									
PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	Jumlah Petugas & Pendamping Sosial Pemberdayaan FM.	198 org	143 org	50 org	50 org	100%	370 org	470 org	72.22 %
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA MISKIN	Jumlah FM yang mendapat bantuan	1320 org	680 KK	250 KK	250 KK	100%	220 KK	1.150 KK	87.12%
<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>									
PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Jumlah Lokasi Pelaksanaan KIE bagi PMKS	20 lok	300 org	50 org	50 org	100%	50 org	400 Org	
BIMBINGAN SOSIAL DAN KETRAMPILAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR DAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI	Jumlah anak terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi yang mendapat pelayanan di PSBRKW	720 org	370 org	120 org	120 org	100%	140 org	630 org	87.50%
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga	Jumlah Lanjut Usia yang ditangani di keluarga	840 org	39 Org	39 org	39 org	100%	39 org	117 org	13.92%

<b>PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR</b>									
PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK TERLANTAR	Jumlah anak terlantar	180 org	60 org	15 org	15 org	100%	15 org	90 org	50 %
<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA</b>									
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapat pelayanan	180 org	150 org	10 org	10 org	100%	15 org	175 org	97.22%
<b>PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO</b>									
PELAYANAN SOSIAL BAGI PENGHUNI ASUHAN /PANTI JOMPO	Jumlah lanjut usia yang dilayani di PSTW Sinta Rangkang	600 org	265 org	85 org	85 org	100%	80 org	430 org	71.67%
<b>PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT LAINNYA)</b>									
PEMBERDAYAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	Jumlah eks Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mendapat pelayanan	480 org	120 org dan 3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	120 org dan 5 laporan	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	Jumlah eks Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mendapat pelayanan	480 org	160 org	40 org	40 org	100%	80 org	280 org	58.33%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>									
PEMBINAAN MANAJER SOSIAL KECAMATAN / TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)	Jumlah Manager Sosial Kecamatan/TKSK yang mendapat pembinaan	210 org	105orang	35 org	35 org	100%	35 org	175 org	83.33%
PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL	Jumlah lembaga Organisasi sosial Yang diberdayakan	180 orsos	6 orsos	2 orsos	2 orsos	100%	6 orsos	14 orsos	7.78%
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA	Jumlah Lembaga Karang Taruna yang mendapat pembinaan sosial	120 orang	80 orang	15 orang	15 orang	100%	30 orang	125 orang	104.17%
PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN & KSN.	Jumlah masyarakat yang memahami nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan & kesetiakawanan sosial	6000 org	60 org dan 2 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	60 org dan 3 laporan	
FASILITASI KOMDA LANSIA	Jumlah Kegiatan Komda Lansia	5pkt	3 pkt	1 pkt	1 pkt	100%	1 pkt	5 pkt	100 %
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>									

FASILITASI PELAYANAN BANTUAN PADA PMKS	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1600 org	300 org	100 org	100 org	100%	100 org	500 org	31.25%
Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah lokasi pelaksanaan PKH	14 Kab/kota	14 laporan	14 Kab/kota	14Kab/kota	100%	14 Kab/kota	14 kab/kota	100%
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana	Jumlah Kegiatan PSDS	60 Keg	3 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 keg	5 keg	8.33%
Perlindungan Sosial PMKS di Trauma Center	Jumlah Korban KTK yang ditangani	150 org	75 org	25 Org	25 org	100%	25 org	125 org	83.33%
Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah KSB yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota	600 Org	100 org	100 org	100 org	100%	50 org	250 org	41.67%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah PMKS yang terpenuhi perlindungannya	5 Lap	2 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	4 laporan	80%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu **Peraturan Menteri Sosial RI tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)** Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Layanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Minimal.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar daerah provinsi meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dalam panti
- b. Rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

### 2. Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi

Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah 77, 39% dengan rincian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian	
				Target Realisasi tahun 2020 (%)	Realisasi tahun 2020 (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas dalam panti	2020	16,67	31,25

		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			
2	Rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti	2020	16,67	63,68
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia dalam panti	2020	16,67	100
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di	Terpenuhinya kebutuhan dasar tuna sosial khususnya	2020	-	-

	dalam panti	gelandangan dan pengemis dalam panti			
		Persentase (%) kebutuhan dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana provinsi	2020	16,67	100
		Persentase (%) korban bencana provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	<b>RATA-RATA</b>				<b>58,99</b>

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tugas pokok tersebut diatas, yang menjadi tanggung jawab dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- Masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota.
- Masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya.
- Semakin kompleksitasnya permasalahan kesejahteraan sosial, yang memerlukan penanganan secara terus menerus dalam rangka menekan timbulnya permasalahan baru.
- Semakin meluas dan meningkatnya pengguna Napza di masyarakat, sehingga perlunya edukasi mengenai dampak dari penyalahgunaan NAPZA sehingga Dinas Sosial memberikan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat melalui Pusat Informasi dan Edukasi (PIE) Napza.

### b. Permasalahan, hambatan dan Tantangan

- Masih banyaknya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum terverifikasi dan tervalidasi dengan baik di Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah. DTKS digunakan sebagai dasar pemberian bantuan sosial dan bantuan dari pusat dalam rangka penanganan kesejahteraan sosial kepada keluarga miskin yang ada di Kalimantan Tengah sehingga

menyebabkan beberapa data tidak valid dan penerima bantuan tidak tepat sasaran.

- Rendahnya pengetahuan/pendidikan ketrampilan Keluarga Binaan Sosial dalam mengelola Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sehingga kurang memiliki rasa tanggung jawab maupun kebersamaan sehingga sulit berkembang.
- Organisasi Sosial sebagai pilar partisipasi sosial masyarakat dalam melaksanakan penyantunan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada umumnya masih tergantung pada pemerintah belum mampu mandiri.
- Penyuluhan Sosial sebagai gerak dasar pembangunan Kesejahteraan Sosial belum diimbangi dengan kualitas/kwantitas tenaga penyuluh yang tersertifikasi dan minimnya dana untuk penyuluhan sosial menyebabkan kegiatan penyuluhan sosial tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
- Meningkatnya permasalahan sosial selama Pandemi Covid-19 di masyarakat dan keterbatasan kemampuan Dinas Sosial seperti keterbatasan dana APBD, tenaga pegawai, sarana dan prasarana menyebabkan beberapa layanan sosial tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Keterpaduan perencanaan program dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Propinsi dan Pusat sebagai proses bottom up planning untuk menjangkau aspirasi masyarakat di daerah belum maksimal.
- Dukungan dana pendamping APBD Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dibiayai dari dana APBN maupun APBD Propinsi masih terbatas.
- Penyebaran penduduk yang tidak merata dan sulitnya kondisi geografis serta transportasi menyebabkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial belum dapat merata menjangkau seluruh masyarakat.
- Faktor penyebaran penduduk yang tidak merata dan rumah/tempat tinggal penduduk yang berjauhan menghambat kerjasama dalam mengelola bantuan secara kelompok.
- Sebagian pemerintah Kabupaten/Kota belum melihat pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu hal yang penting dibanding dengan bidang lain, hal ini dapat dilihat dari komitmen untuk membentuk kelembagaan yang menangani permasalahan sosial di daerah maupun alokasi dana yang disediakan untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- Peran dunia usaha melalui program CSR belum banyak menyentuh pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sehingga perlu didorong dalam rangka mengoptimalkan CSR dalam bidang sosial.

c. Hambatan dalam melaksanakan visi dan misi sesuai tupoksi.

- Dalam setiap pencapaian target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu, sering tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini sering terjadi adanya kebijakan baru yang menyebabkan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti adanya kebijakan penanganan korban bencana yang merupakan kejadian tidak terduga sehingga tidak dapat dialokasikan dalam rencana kerja.
- Kondisi geografis Kalimantan Tengah terutama dalam penanganan permasalahan sosial di desa tertinggal atau sangat tertinggal yang rata-rata berada di daerah terpencil / sulit dijangkau, sehingga memerlukan pembiayaan operasional yang cukup besar, disatu sisi anggaran yang dialokasikan sangat terbatas, sehingga dalam penanganannya selalu menjadi pertimbangan.

d. Peluang.

- Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota akan memberikan arah yang lebih baik dan terukur bagi pelaksanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di daerah.
- Terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 111/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial akan memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.
  - Dukungan PKSK seperti PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat, akan sangat membantu dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - Dinas Sosial akan meningkatkan kerjasama dan peran serta dunia usaha dan CSR dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada dimasyarakat .
  - Adanya perhatian dan kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial serta penanganan fakir miskin yang menjadi prioritas baik secara nasional maupun daerah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kalimantan Tengah.
- e. Penentuan Isu-isu Strategis .
- Terbuka dan semakin lancarnya transportasi darat antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah juga membawa dampak negatif diantaranya mudahnya terjadi perpindahan PMKS tertentu antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, misalnya untuk PMKS Tuna Sosial, Gelandangan dan Pengemis.
  - Berkembangnya perusahaan besar perkebunan sawit dan pertambangan, tidak hanya berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak sosial bagi masyarakat, terutama masalah ketenagakerjaan dan lahan masyarakat yang menjadi sengketa, sehingga berpotensi terjadinya konflik sosial.
  - Melakukan updating data PMKS dan PSKS, BPNT, Vervali data PSKS, Verval data PBI Program BPJS, yang disertai dengan by name by adress yang valid sehingga penerima bantuan sosial menjadi tepat sasaran.
  - Terbangunnya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di masing-masing Kabupaten/Kotasebagai sarana penanganan kemiskinan daerah yang secara berjenjang dengan pembangunan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yang dikaitkan dengan kegiatan yang sama yang akan dilaksanakan

pada tahun 2022, dapat dikaji beberapa permasalahan yang dianggap penting untuk disempurnakan di masa mendatang yaitu :

- Peningkatan kapasitas untuk pekerja sosial profesional perlu mendapat perhatian yang cukup untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pelayanan. Sehingga dana yang tersedia untuk saat ini perlu ditingkatkan agar seluruh peksos mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Belum optimalnya pendayagunaan sarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam bidang Sosial. Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan sejumlah peralatan kantor dan gedung secara efektif dan efisien maupun penggunaan tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Keterbatasan jumlah SDM baik tenaga fungsional maupun staff dan penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada yaitu dalam penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (back ground pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban).
- Permasalahan penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial sebagai salah satu PD yang diberikan kewenangan dalam penanganan fakir miskin, terutama dalam pengelolaan melalui program dekonsentrasi Kementerian Sosial. Bila dibandingkan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, maka jumlah dana APBD Kalimantan Tengah masih terlalu minim, sehingga perlu peningkatan pelayanan secara kualitas maupun kuantitas yang di dukung oleh dana yang memadai untuk suatu program pemberdayaan masyarakat miskin.
- Sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara profesional belum optimal. Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date adalah suatu kebutuhan yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada stakeholders atau pengguna data baik dari lembaga pemerintah pusat, provinsi kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Dinas Sosial, sebagai dinas teknis di bidang sosial, telah berupaya meningkatkan pengelolaan manajemen, penyajian publikasi data dan informasi yang lengkap dan berkualitas sehingga diharapkan pada akhirnya akan mengurangi kesalahan-kesalahan

dalam merumuskan program/kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial dapat tepat sasaran.

- Dinas Sosial mempunyai peranan dalam melayani rehabilitasi PMKS, Namun dana yang diberikan oleh APBD daerah belum mencukupi untuk melayani masyarakat yang memerlukan perlindungan dan layanan sosial.

**TABEL 2.4**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2022**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Tahun 2022	Pagu Usulan Tahun 2022	KET
					Capaian Program		Keluaran kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.06	Sosial									33,154,,457,862	34,907,288,940	
	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Terlaksananya administrasi penunjang urusan pemerintah daerah								
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja				366,047,450	366,047,450	
	1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		Palangka Raya					Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 dokumen	35,000,000	35,000,000	

	1.06.01.1.01.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD		Palangka Raya					Jumah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	1 laporan	35,056,250	35,056,250	
	1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja SKPD		Palangka Raya					Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun	1 laporan	295,991,200	295,991,200	
	1.06.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan			<b>12,503,929,462</b>	<b>13,892,349,840</b>	
	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN		Palangka Raya					Tersalurkannya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12,249,600,762	13,576,269,840	
	1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Palangka Raya					Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	254,328,700	316,080,000	
	1.06.01.1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>					Terlaksananya administrasi BMD				<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	
	1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							Tersedianya pengamanan BMD	12 bulan	13,000,000	13,000,000	

1.06.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		Palangka Raya			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				<b>499,510,600</b>	<b>499,510,600</b>	
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya							Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang tersedia	156 pasang	205,000,000	205,000,000	
1.06.01.1.05.09	Diklat Kepegawaian berdasarkan Tugas & Fungsi		Palangka Raya					Jumlah ASN yang mengikuti diklat	25 orang	94,510,000	94,510,000	
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Palangka Raya					Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	50 orang	200,000,000	200,000,000	
1.06.01.1.06	<i>Administrasi Umum Pemerintah Daerah</i>					Terlaksananya administrasi umum pemerintah daerah	12 bulan			<b>1,012,607,400</b>	<b>1,012,607,400</b>	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Palangka Raya					Jumlah komponen listrik yang tersedia	12 bulan	113,983,500	113,983,500	

1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor		Palangka Raya					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	117,921,600	117,921,600	
1.06.01.1.06.05	Pengadaan Barang Cetak & Penggandaan							Jumlah barang cetakan & penggandaan	12 bulan	139,700,000	139,700,000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan		Palangka Raya					Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	197,820,000	197,820,000	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Palangka Raya					Jumlah tamu yang terfasilitasi	1515 kotak	20,000,000	20,000,000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD		Provinsi Kalimantan Tengah dan luar daerah					Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	30 kali	393,182,300	393,182,300	
1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Palangka Raya					Jumlah sistem berbasis elektronik yang tersedia	1 aplikasi	30,000,000	30,000,000	
1.06.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>					Tersedianya BMD penunjang	2 unit			<b>3,500,000,000</b>	<b>3,700,000,000</b>	

	1.06.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Palangka Raya					Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	600,000,000	700,000,000	
	1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Palangka Raya					Jumlah bangunan yang dibangun	3 unit	2,500,000,000	2,500,000,000	
	1.06.01.1.07.10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Palangka Raya					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	2 paket	400,000,000	500,000,000	
	1.06.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			<b>2,825,942,400</b>	<b>2,825,942,400</b>	
	1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Palangka Raya					Tersedianya jasa surat menyurat	1.560 lembar	16,000,000	16,000,000	
	1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Palangka Raya					Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	583,333,000	583,333,000	
	1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Palangka Raya					Tersedianya jasa layanan umum kantor	12 bulan	2,226,609,400	2,226,609,400	

1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah					Jumlah BMD yang mendapatkan pemeliharaan				<b>940,000,000</b>	<b>944,000,000</b>	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Palangka Raya					Jumlah kendaraan operasional yang dibayar pajaknya	20 Unit	350,000,000	350,000,000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya		Palangka Raya					Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	3 Unit	510,000,000	510,000,000	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Palangka Raya					Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	12 Bulan	80,000,000	84,000,000	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial			Jumlah Karang Taruna, LKS, TKSK	25 Lembaga					<b>1,009,340,600</b>	<b>1,017,725,000</b>	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi					Jumlah penerbitan izin pengumpulan sumbangan yang terlaksana	12 bulan			<b>59,746,000</b>	<b>59,746,000</b>	

1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin UGB dan PUB yang terlaksana	12 bulan	59,746,000	59,746,000	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						Jumlah PSKS yang diberdayakan	1 Lembaga		<b>949,594,0000</b>	<b>957,979,000</b>	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi							Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan dan layanan	1 Lembaga	45,021,900	50,000,000	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi							Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan dan layanan	136 orang	226,593,1000	230,000,000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi							Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan layanan	1 Lembaga	677,979,000	677,979,000	
1.06.03	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>			Jumlah Warga yang dipulangkan ke daerah asal	75 orang					<b>237,633,050</b>	<b>250,000,000</b>	

	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Palangka Raya			Jumlah Warga yang dipulangkan ke daerah asal	75 orang			237,633,050	250,000,000	
	1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal							Jumlah Warga yang dipulangkan ke daerah asal	75 orang	250,000,000	262,500,000	
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial			Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti	220 Orang					<b>7,244,399,300</b>	<b>7,344,901,250</b>	
	1.06.04.1.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti</i>					Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	20 Orang			<b>764,053,300</b>	<b>775,000,000</b>	

	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan permakanan	20 Orang	304,520,000	305,000,000	
	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan sandang	20 Orang	24,900,000	25,000,000	
	1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti							Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20 Orang	20,000,000	20,000,000	
	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial	20 Orang	52,750,000	53,000,000	

	1.06.04.1.01.07	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari	20 Orang	49,4000,000	50,000,000	
	1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas dalam panti yang dapat mengakses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	20 Orang	113,944,000	115,000,000	
	1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat ditemukan keluarganya	20 Orang	40,558,000	45,000,000	

	1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat kembali ke keluarga	20 Orang	40,000,000	44,000,000	
	1.06.04.1.01.12	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		Palangka Raya					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Laporan	117,981,300	118,000,000	
	1.06.04.1.02	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti</i>					Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dalam Panti	80 Anak			<b>4,624,506,650</b>	<b>4,633,222,250</b>	

	1.06.04.1.02.01	Pengasuhan		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	80 Anak	102,526,200	103,000,000	
	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makan		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan permakanan	80 Anak	4,163,972,250	4,163,972,250	
	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan sandang	80 Anak	40,000,000	42,000,000	
	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Palangka Raya					Jumlah Asrama yang mudah diakses	80 Anak	16,370,000	17,000,000	

	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80 Anak	4,868,514	5,250,000	
	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80 Anak	11,400,000	12,000,000	
	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	80 Anak	35,975,000	36,500,000	

	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	80 Anak	2,200,000	2,500,000	
	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang dapat ditemukan keluarganya	80 Anak	54,961,200	55,000,000	
	1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang dapat kembali ke keluarga	80 Anak	41,272,000	42,000,000	
	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	80 Anak	10,500,000	12,000,000	

	1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Palangka Raya					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Laporan	140,461,300	142,000,000	
	1.06.04.1.03	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti</i>					Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	80 Orang			<b>1,261,982,500</b>	<b>1,276,600,000</b>	
	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	80 Orang	736,700,000	740,000,000	
	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	80 Orang	42,300,000	43,000,000	
	1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Palangka Raya					Jumlah Asrama yang mudah diakses	80 Orang	14,197,000	14,500,000	

	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Alat Bantu	80 Orang	9,000,000	10,000,000	
	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang	26,000,000	28,600,000	
	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	80 Orang	9,800,000	10,000,000	
	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	80 Orang	7,500,000	7,500,000	

	1.06.04.1.03.08	Fasilitasi Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan NIK	80 Orang	5,440,000	6,000,000	
	1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	80 Orang	18,940,000	20,000,000	
	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Dapat ditelusuri Keluarganya	80 Orang	71,625,000	72,000,000	
	1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Dapat Kembali ke Keluarga	80 Orang	72,275,000	75,000,000	
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang dimakamkan	10 Orang	49,580,000	50,000,000	

	1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		Palangka Raya					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	12 bulan	198,625,000	200,000,000	
	1.06.04.1.05	<i>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS &amp; NAPZA di Dalam Panti</i>					Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	40 Orang			<b>593,796,850</b>	<b>660,079,000</b>	
	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	20 Orang	133,090,250	150,000,000	
	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	20 Orang	23,000,000	24,150,000	

	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20 Orang	51,640,000	54,240,000	
	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	20 Orang	60,466,600	64,000,000	
	1.06.04.1.05.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mengakses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	7,631,000	8,400,000	
	1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Pulang ke Daerah Asal	20 Orang	134,948,000	160,000,000	

1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti		Palangka Raya					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1 Laporan	183,021,000	200,000,000	
<b>1.06.05</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>											
1.06.05.1.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</i>						Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelayanan			<b>1,161,884,600</b>	<b>1,200,000,000</b>	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pendampingan	14 Kab/Kota	350,000,000	350,000,000	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Palangka Raya					Jumlah pengelolaan data fakir miskin lintas Kabupaten/Kota	14 Kab/Kota	350,000,000	350,000,000	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Palangka Raya					Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan	14 Kab/Kota	461,884,600	500,000,000	

	<b>1.06.06</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>			Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	100 Orang							
	1.06.06.1.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>					Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Pelayanan	100 Orang			<b>1,660,223,000</b>	<b>1,661,205,000</b>	
	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan		Palangka Raya					Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Permakanan	100 Orang	326,018,000	327,000,000	
	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Palangka Raya					Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Dukungan Psikososial	100 Orang	1,334,205,000	1,334,205,000	
	<b>1.06.07</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>			Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 TMP					<b>180.000.000</b>	<b>180,000,000</b>	

	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 TMP			180,000,000	180,000,000	
	1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Palangka Raya					Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 TMP	100,000,000	100,000,000	
	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di pelihara	1 TMP	80,000,000	80,000,000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kepada Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses :

- a. Musrembang tingkat desa
- b. Musrembang tingkat kecamatan
- c. Musrembang tingkat kabupaten
- d. Musrembang tingkat provinsi
- e. Informasi dari masyarakat, PSM, Ormas, Orsos serta instansi lain tentang permasalahan sosial yang terjadi
- f. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- g. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan dan program di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- h. Mensosialisasikan dan mengkoordinir kegiatan pihak swasta, masyarakat, PSM, Ormas, Tagana, Orsos dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan sosial.

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1.	Insentif Pendamping Program Sembako (BPNT) untuk 13 Orang	Katingan	48.600.000,-	
2.	Pengadaan perlengkapan APD untuk petugas dan pendamping program sembako (BPNT) di Kabupaten Katingan	Katingan	40.000.000,-	
3.	Pelatihan / Pembinaan Bimbingan Teknis Bagi Karang Taruna	Kotawaringin Barat	20.000.000,-	
4.	Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kemampuan Potensi TKSK dan Bantuan Transport untuk TKSK Kecamatan ke Kabupaten	Barito Utara	200.000.000,-	
5.	Sosialisasi dan Evaluasi Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Barito Utara	200.000.000,-	
6.	Sosialisasi dan Pengawasan	Barito Utara	310.000.000,-	
7.	Rehab berat bangunan panti persinggahan	Kotawaringin Barat	200.000.000,-	
8.	Rehabilitasi kamar isolasi (pembuatan tralis dan MCK)	Kotawaringin Barat	35.000.000,-	
9.	Pelatihan Perbengkelan / Otomotif	Gunung Mas	132.000.000,-	
10.	Pelatihan Tata Rias dan Pelatihan Menjahit	Gunung Mas	40.000.000,-	
11.	Bantuan Kursi Roda 1 Buah dan Tongkat Berjalan / Disabilitas 4 Buah	Gunung Mas	4.350.000,-	
12.	Bantuan Sosial Yang Kena Dampak Bencana	Gunung Mas	20.000.000,-	
13.	Rehab Sosial ODGJ	Barito Utara	200.000.000,-	
14.	Pengadaan lemari pakaian untuk LKS Yara Airo	Katingan	37.500.000,-	
15.	Pengadaan ranjang tingkat untuk LKS Daarul Qur'an Kabupaten Katingan	Katingan	400.000.000,-	
16.	Pengadaan perbekalan kesehatan untuk 7 LKS di	Katingan	70.000.000,-	

	Kabupaten Katingan			
17.	Pengadaan ranjang tingkat untuk LKS Al-Khairat Kabupaten Katingan	Katingan	87.500.000,-	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan nasional terkait dengan kewenangan Kementerian Sosial RI diarahkan pada penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang komprehensif, internal lembaga maupun eksternal lembaga sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kebijakan Kementerian Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagaimana ketentuan RPJMN 2015-2025 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.
4. Menciptakan iklim dan system yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber keluarga dan masyarakat setempat.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial.
- b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);

- d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
- e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
- f. Terjaminnya penyandang disabilitas , lanjut usia non potensial , eks penderita kronis dan penyandang psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- h. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di semua propinsi, kabupaten dan kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Sosial.

Berdasarkan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sosial
2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
3. Potensi sumber kesejahteraan sosial
4. Jumlah fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar
5. Jumlah fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inklusivitas.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun 2022.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD**

Tujuan yang ingin diwujudkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 disesuaikan dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021, penjabarannya adalah sebagai berikut :

#### **Tujuan Pertama : Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

##### **Sasaran :**

Melaksanakan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Panti Sosial Tresna Werdha
- 2) peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita
- 3) pembinaan dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial/Pemberdayaan Fakir Miskin
- 4) Pemberdayaan Komunitas Adat
- 5) Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/Pemberdayaan Keluarga
- 6) Penyediaan dokumen perencanaan yang komprehensif mengenai kesejahteraan sosial masyarakat di Kalimantan Tengah/Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan

**Sasaran :**

Melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- 1) Rehabilitasi Tuna Sosial
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia
- 4) Pembinaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar
- 5) Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat
- 6) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi anak nakal

**Tujuan Kedua : Terwujudnya kemitraan dan aktualisasi potensi Kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial**

**Sasaran :**

Melaksanakan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Karang Taruna dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial
- 2) Pemberdayaan LSM dan Organisasi Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial
- 3) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial
- 4) Kerjasama lintas sektor dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
- 5) Pendayagunaan sumber dana sosial
- 6) Pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
- 7) pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan social

**Tujuan Ketiga : Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipasi Bencana Alam dan Sosial**

**Sasaran :**

Melaksanakan Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah bencana alam dan bencana lainnya (SAR)
- 2) Pemberdayaan korban bencana sosial
- 3) Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migran

4) Akses jaminan sosial

### 3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Tujuh Program, 17 kegiatan dan 78 sub kegiatan.

Program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berdasarkan sumber dana APBD Provinsi meliputi program pengentasan kemiskinan yang menjadi Program Prioritas daerah serta Program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan bencana alam dan bencana sosial yang menjadi program wajib pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		
				2	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD		
				3	Evaluasi Kinerja SKPD		
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN
						2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya		
				2	Diklat Kepegawaian berdasarkan Tugas & Fungsi		

				3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
		5	<b>Administrasi Umum Pemerintah Daerah</b>	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
				3	Pengadaan Barang Cetak & Penggandaan
				4	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
				7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				2	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas

					Operasional Lapangan
				2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Pemberdayaan Sosial	9	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penribitan Izin Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang
				1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
		10	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	11	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
4	Program Rehabilitasi Sosial	12	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	1	Penyediaan Permakanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

				4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial
				5	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari
				6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				9	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		13	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti</b>	1	Pengasuhan
				2	Penyediaan Makanan
				3	Penyediaan Sandang
				4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

				10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				11	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti
				12	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
				1	Penyediaan Makanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				4	Penyediaan Alat Bantu
				5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
		14	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia dalam Panti</b>	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				12	Pemulasaraan

		15	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti</b>	1	Penyediaan Makanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				5	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				6	Pemulangan ke Daerah Asal
				7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA
5	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	16	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	1	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
6	<b>Program Penanganan Bencana</b>	17	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>	1	Penyediaan Permakanan
				2	Pelayanan Dukungan Psikososial
7	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	18	<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				2	Pemeliharaan TMP Nasional Provinsi

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dalam pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk Tahun 2022 belum tertampung di dalam usulan RKPD awal Tahun 2022 sehingga ada beberapa usulan tambahan Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan dalam pada Renja Tahun 2022. Ketidaksesuai antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran pada sub kegiatan dan penambahan sub kegiatan baru pada Tahun 2022.



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berdasarkan sumber dana APBD Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Tahun 2022	Pagu Usulan Tahun 2022	KET
					Capaian Program		Keluaran kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.06	Sosial									33,154,,457,862	34,907,288,940	
	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Terlaksananya administrasi penunjang urusan pemerintah daerah								
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja				366,047,450	366,047,450	

	1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		Palangka Raya					Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 dokumen	35,000,000	35,000,000	
	1.06.01.1.01.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD		Palangka Raya					Jumah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	1 laporan	35,056,250	35,056,250	
	1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja SKPD		Palangka Raya					Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun	1 laporan	295,991,200	295,991,200	
	1.06.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan			<b>13,838,080,762</b>	<b>13,892,349,840</b>	
	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN		Palangka Raya					Tersalurkannya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12,249,600,762	13,576,269,840	
	1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Palangka Raya					Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	254,328,700	316,080,000	

1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Terlaksananya administrasi BMD				13,000,000	13,000,000	
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							Tersedianya pengamanan BMD	12 bulan	13,000,000	13,000,000	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Palangka Raya			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				499,510,600	499,510,600	
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya							Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang tersedia	156 pasang	205,000,000	205,000,000	
1.06.01.1.05.09	Diklat Kepegawaian berdasarkan Tugas & Fungsi		Palangka Raya					Jumlah ASN yang mengikuti diklat	25 orang	94,510,000	94,510,000	
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Palangka Raya					Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	50 orang	200,000,000	200,000,000	

	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah					Terlaksananya administrasi umum pemerintah daerah	12 bulan			<b>1,012,607,400</b>	<b>1,012,607,400</b>	
	1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Palangka Raya					Jumlah komponen listrik yang tersedia	12 bulan	113,983,500	113,983,500	
	1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor		Palangka Raya					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	117,921,600	117,921,600	
	1.06.01.1.06.05	Pengadaan Barang Cetak & Penggandaan							Jumlah barang cetakan & penggandaan	12 bulan	139,700,000	139,700,000	
	1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan		Palangka Raya					Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1000 eksemplar	197,820,000	197,820,000	
	1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Palangka Raya					Jumlah tamu yang terfasilitasi	200 orang	20,000,000	20,000,000	

	1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD		Provinsi Kalimantan Tengah dan luar daerah					Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	30 kali	393,182,300	393,182,300	
	1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Palangka Raya					Jumlah sistem berbasis elektronik yang tersedia	1 aplikasi	30,000,000	30,000,000	
	1.06.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>					Tersedianya BMD penunjang	2 unit			<b>3,500,000,000</b>	<b>3,700,000,000</b>	
	1.06.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Palangka Raya					Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	600,000,000	700,000,000	
	1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Palangka Raya					Jumlah bangunan yang dibangun	3 unit	2,500,000,000	2,500,000,000	
	1.06.01.1.07.10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Palangka Raya					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	2 paket	400,000,000	500,000,000	

1.06.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			<b>2,825,942,400</b>	<b>2,957,000,000</b>	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Palangka Raya					Tersedianya jasa surat menyurat	1.560 lembar	16,000,000	17,000,000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Palangka Raya					Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	583,333,000	640,000,000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Palangka Raya					Tersedianya jasa layanan umum kantor	12 bulan	2,226,609,400	2,300,000,000	
1.06.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>						Jumlah BMD yang mendapatkan pemeliharaan			<b>940,000,000</b>	<b>944,000,000</b>	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Palangka Raya					Jumlah kendaraan operasional yang dibayar pajaknya	20 Unit	350,000,000	350,000,000	

1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya		Palangka Raya					Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	3 Unit	510,000,000	510,000,000	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Palangka Raya					Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	12 Bulan	80,000,000	84,000,000	
1.06.02	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>			Jumlah Karang Taruna, LKS, TKSK	25 Lembaga					<b>1,009,340,600</b>	<b>1,017,725,000</b>	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi					Jumlah penerbitan izin pengumpulan sumbangan yang terlaksana	12 bulan			<b>59,746,000</b>	<b>59,746,000</b>	
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin UGB dan PUB yang terlaksana	12 bulan	59,746,000	59,746,000	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					Jumlah PSKS yang diberdayakan	1 Lembaga			<b>949,594,0000</b>	<b>957,979,000</b>	

	1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi							Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan dan layanan	1 Lembaga	45,021,900	50,000,000	
	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi							Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan dan layanan	136 orang	226,593,1000	230,000,000	
	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi							Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan layanan	1 Lembaga	677,979,000	677,979,000	
	1.06.03	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>			Jumlah Warga yang dipulangkan ke daerah asal	75 orang					<b>237,633,050</b>	<b>250,000,000</b>	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Palangka Raya			Jumlah Warga yang dipulangkan ke daerah asal	75 orang			237,633,050	250,000,000	

	1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						Jumlah Warga yang dipulangkan ke daerah asal	75 orang	250,000,000	262,500,000	
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial			Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti	220 Orang				7,244,399,300	7,344,901,250	
	1.06.04.1.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti</i>					Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	20 Orang		764,053,300	775,000,000	
	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan		Palangka Raya				Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan permakanan	20 Orang	304,520,000	305,000,000	

	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan sandang	20 Orang	24,900,000	25,000,000	
	1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti							Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20 Orang	20,000,000	20,000,000	
	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial	20 Orang	52,750,000	53,000,000	

	1.06.04.1.01.07	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari	20 Orang	49,400,000	50,000,000	
	1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas dalam panti yang dapat mengakses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	20 Orang	113,944,000	115,000,000	
	1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat ditemukan keluarganya	20 Orang	40,558,000	45,000,000	

	1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Palangka Raya				Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat kembali ke keluarga	20 Orang	40,000,000	44,000,000	
	1.06.04.1.01.12	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		Palangka Raya				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Laporan	117,981,300	118,000,000	
	1.06.04.1.02	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti</i>					Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dalam Panti	80 Anak		<b>4,624,506,650</b>	<b>4,633,222,250</b>	

	1.06.04.1.02.01	Pengasuhan		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	80 Anak	102,526,200	103,000,000	
	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makan		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan permakanaan	80 Anak	4,163,972,250	4,163,972,250	
	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan sandang	80 Anak	40,000,000	42,000,000	
	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Palangka Raya					Jumlah Asrama yang mudah diakses	80 Anak	16,370,000	17,000,000	

	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80 Anak	4,868,514	5,250,000	
	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80 Anak	11,400,000	12,000,000	
	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	80 Anak	35,975,000	36,500,000	

	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	80 Anak	2,200,000	2,500,000	
	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang dapat ditemukan keluarganya	80 Anak	54,961,200	55,000,000	
	1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang dapat kembali ke keluarga	80 Anak	41,272,000	42,000,000	

	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti		Palangka Raya					Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	80 Anak	10,500,000	12,000,000	
	1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Palangka Raya					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Laporan	140,461,300	142,000,000	
	1.06.04.1.03	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti</i>					Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	80 Orang			<b>1,261,982,500</b>	<b>1,276,600,000</b>	

	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	80 Orang	736,700,000	740,000,000	
	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	80 Orang	42,300,000	43,000,000	
	1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Palangka Raya					Jumlah Asrama yang mudah diakses	80 Orang	14,197,000	14,500,000	
	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Alat Bantu	80 Orang	9,000,000	10,000,000	
	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang	26,000,000	28,600,000	

	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	80 Orang	9,800,000	10,000,000	
	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	80 Orang	7,500,000	7,500,000	
	1.06.04.1.03.08	Fasilitasi Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan NIK	80 Orang	5,440,000	6,000,000	
	1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	80 Orang	18,940,000	20,000,000	

	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Dapat ditelusuri Keluarganya	80 Orang	71,625,000	72,000,000	
	1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Dapat Kembali ke Keluarga	80 Orang	72,275,000	75,000,000	
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan		Palangka Raya					Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang dimakamkan	10 Orang	49,580,000	50,000,000	
	1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		Palangka Raya					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	12 bulan	198,625,000	200,000,000	

	1.06.04.1.05	<i>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS &amp; NAPZA di Dalam Panti</i>					Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	40 Orang			<b>593,796,850</b>	<b>660,079,000</b>	
	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	20 Orang	133,090,250	150,000,000	
	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	20 Orang	23,000,000	24,150,000	
	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20 Orang	51,640,000	54,240,000	

	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	20 Orang	60,466,600	64,000,000	
	1.06.04.1.05.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Mengakses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	7,631,000	8,400,000	
	1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal		Palangka Raya					Jumlah PMKS dalam Panti yang Pulang ke Daerah Asal	20 Orang	134,948,000	160,000,000	

1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti		Palangka Raya					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1 Laporan	183,021,000	200,000,000	
<b>1.06.05</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>											
1.06.05.1.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</i>						Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelayanan			<b>1,161,884,600</b>	<b>1,200,000,000</b>	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pendampingan	14 Kab/Kota	350,000,000	350,000,000	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Palangka Raya					Jumlah pengelolaan data fakir miskin lintas Kabupaten/Kota	14 Kab/Kota	350,000,000	350,000,000	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Palangka Raya					Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan	14 Kab/Kota	461,884,600	500,000,000	

	<b>1.06.06</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>			Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	100 Orang							
	1.06.06.1.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>					Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Pelayanan	100 Orang			<b>1,660,223,000</b>	<b>1,661,205,000</b>	
	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan		Palangka Raya					Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Permakanan	100 Orang	326,018,000	327,000,000	
	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Palangka Raya					Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Dukungan Psikososial	100 Orang	1,334,205,000	1,334,205,000	
	<b>1.06.07</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>			Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 TMP					<b>180.000.000</b>	<b>180,000,000</b>	

	1.06.07.1.01	<i>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>					Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 TMP			<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	
	1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Palangka Raya					Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 TMP	100,000,000	100,000,000	
	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di pelihara	1 TMP	80,000,000	80,000,000	

## **BAB V P E N U T U P**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2020, beberapa hal yang menjadi catatan penting :

1. Kondisi Provinsi Kalimantan Tengah yang rawan bencana, untuk mengantisipasi perlu adanya kesiapsiagaan dari petugas dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat (emergency) bencana.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. Berkaitan dengan hal tersebut kewenangan SPM, Dinas Sosial Provinsi berkewajiban untuk mengelola Program Rehabiltasi Sosial Dasar yang berada di dalam panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup Provinsi.
3. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih akan mengalami kehidupan yang cukup berat dikarenakan dampak dari bencana Covid 19 yang sangat signifikan menyebabkan munculnya masyarakat miskin baru dan rentan miskin sebagai dampak terjadinya bencana Covid yang berpengaruh di semua sektor.

Situasi yang berat tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rencana Tindak Lanjut Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial, rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan, Pembangunan Panti Sosial Bina Laras Pambelum sebagai UPT yang akan melaksanakan pelayanan dan perlindungan bekas eks psikotik yang ada di Kalimantan Tengah dengan adanya penambahan volume kapasitas klien yang dilayani.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Dalam penyusunan Renja ini perlu disusun beberapa kaidah-kaidah yang terkait pelaksanaan Program/Kegiatan yang meliputi :

- a. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- b. Mepedomani Urusan yang telah diatur sesuai dengan UU .23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam tahun anggaran 2022. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, Agustus 2021  
**Plt. Kepala Dinas,**

**FARID WAJDI, A.KS., M.SW**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700724 199201 1 001

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan domain bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rencana Tindak Lanjut Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial, rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan, Pembangunan Panti Sosial Bina Laras belum sebagai UPT yang akan melaksanakan pelayanan dan perlindungan bekas psikotik yang ada di Kalimantan Tengah dengan adanya penambahan volume kapasitas klien yang dilayani.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Dalam penyusunan Renja ini perlu disusun beberapa kaidah-kaidah yang terkait pelaksanaan Program/Kegiatan yang meliputi :

- a. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- b. Mempedomani Urusan yang telah diatur sesuai dengan UU .23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam tahun anggaran 2022. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.



Palangka Raya, Agustus 2021  
Pit. Kepala Dinas,

**FARID WAJDI, A.KS., M.SW**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700724 199201 1 001